

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI DIBUKA	KONSEKUENSI DITUTUP	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
1	Data SP2D ke pihak ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ul>	Kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara terutama dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</li> </ul>	Perlindungan usaha	permanen
2	Laporan detil keuangan (rincian belanja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ul>	Kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara terutama; serta kemungkinan kesalahpahaman terhadap informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</li> <li>Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi</li> </ul>	Kelancaran proses pemeriksaan	permanen
3	Rencana kerja dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ul>	Kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara terutama; serta kemungkinan kesalahpahaman terhadap informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</li> <li>Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi</li> </ul>	Data belum memiliki ketetapan hukum (belum bersifat final)	permanen
4	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>Perpres No. 54 Tahun 2010</li> </ul>	Persaingan usaha yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pihak yang terlibat kontrak</li> </ul>	Perlindungan usaha	sampai dengan proses selesai
5	Dokumen kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003</li> </ul>	Persaingan usaha yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pihak yang terlibat kontrak</li> <li>Melindungi hak atas kekayaan</li> </ul>	Perlindungan usaha	permanen

		<p>Pasal 31</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010</li> </ul>		intelektual		
6	Dokumen penawaran barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>• UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>• PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010</li> </ul>	Persaingan usaha yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi pihak yang terlibat kontrak</li> <li>• Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> </ul>	Perlindungan usaha	sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak
7	Daftar user dan password server/aplikasi/perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>• PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>• PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b)</li> <li>• Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ul>	Memungkinkan aktivitas peretasan data pada server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dan mengamankan perangkat data</li> </ul>	Keamanan Data	permanen
8	Data Pribadi (detail) Pegawai ASN/Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>• UU No. 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>	Penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana atau kriminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN</li> </ul>	Keamanan Data	selama masih berlaku
9	Dokumen LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 j</li> <li>• UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 322</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44</li> <li>• Keputusan Ketua</li> </ul>	Penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana atau kriminal, serta mengganggu kenyamanan dan hak privasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak kenyamanan Privasi</li> <li>• Menghindari tindakan penyimpangan penyalahgunaan data pribadi</li> </ul>	Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum; Menjaga keakuratan data pemeriksaan selama dalam proses lelang / pengadaan sebelum diumumkan; Mencegah terjadinya tindak	permanen

		<p>Komisi Pemberantasan Korupsi No.KEP.07/KPK/02/2005 Tata Cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara</p>			<p>korupsi atau penyalahgunaan wewenang</p>	
10	<p>Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6</li> <li>• UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan</li> </ul>	<p>Mengganggu proses penyelidikan pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak Privasi</li> <li>• Menjaga Proses Penyelidikan Pengawasan</li> </ul>	<p>Menjaga kelangsungan proses hukum</p>	<p>sampai ada keputusan hasil pengaduan</p>